

Konsep Pemerataan Pembangunan Pendidikan Nasional Sebagai Alternatif Kemajuan Pendidikan Indonesia

Muhamad Basyrul Muvid

Sistem Informasi, muvid@dinamika.ac.id, Universitas Dinamika Surabaya

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the concept of equitable development of national education. Bearing in mind, this can be used as an alternative in advancing, improving the quality and quality of national education. The research method used is library research, where the primary sources are books, journals, documents, and internet links that are appropriate to the topic of study. The results of the study show that equity in national development is a primary (upstream) matter that needs to be addressed and encouraged for the sake of equitable progress in education, bearing in mind that there are still many disparities between one school and another, not to mention between public schools and madrasahs, between the private sector and the state. For that, the government needs to solve this fundamental problem. It is hoped that equity in the development of national education can be a solution, so that educational institutions in Indonesia can be equal, equal and can compete in a balanced way.

Keywords: Equality, Development, Education, Progress, Alternatives.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji tentang konsep pemerataan pembangunan pendidikan nasional. Mengingat, hal tersebut bisa dijadikan alternatif dalam memajukan, membenahi mutu dan kualitas pendidikan nasional. Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi kepustakaan, di mana sumber primernya ialah berbagai buku, jurnal, dokumen, dan link-link internet yang sesuai dengan topik kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan nasional merupakan hal yang primer (hulu) yang perlu dibenahi dan digalakkan demi kemajuan pendidikan secara merata, mengingat masih banyak ketimpangan antar sekolah satu dengan lainnya, belum lagi antara sekolah umum dengan madrasah, antara swasta dengan negeri. Untuk itu, pemerintah perlu menyelesaikan problem mendasar ini. Pemerataan pembangunan pendidikan Nasional diharapkan bisa menjadi solusi, sehingga lembaga pendidikan di Indonesia bisa sederajat, sama, dan bisa bersaing secara seimbang.

Kata Kunci: Pemerataan, Pembangunan, Pendidikan, Kemajuan, Alternatif.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tiang penyangga suatu bangsa dimana bangsa akan maju manakala sistem pendidikannya bermutu dan terarah. Memang sektor pendidikan bukan satu- satunya sektor yang dapat memajukan bangsa. Namun, pendidikan sebagai salah satu sektor utama dan terpenting yang turut serta dalam memajukan suatu bangsa. Mengingat, dunia pendidikan sebagai sarana dalam membentuk, menempa, dan menggali berbagai potensi peserta didik sebagai generasi bangsa berikutnya. Tujuan pendidikan jelas sebagai pembentukan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berdaya saing secara global. Semaju apapun ekonomi suatu bangsa, semapan apapun politik suatu bangsa dan sebesar apapun pendapatan belanja suatu bangsa, jika masyarakatnya jauh dari kemajuan dalam bidang pendidikan, bangsa tersebut lama kelamaan akan goyah bahkan hancur.

Sumber daya manusia inilah sebagai kunci dalam memajukan, menjaga dan mempertahankan bangsa dari kepongkaban zaman yang serba cepat yang menuntut kecakapan dalam bersaing secara global.¹ Suatu bangsa dapat menjadi bangsa kreatif, inovatif dan kompetitif manakala di sini oleh sumber daya manusia yang maju, cerdas, cakap dan berdedikasi tinggi. Sebaliknya, bangsa yang memiliki sumber daya manusia rendah dapat dipastikan bangsa tersebut tidak berani “unjuk gigi” di mata dunia; di depan negara lain, sulit bersaing dengan negara-negara dunia, dan tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang begitu cepat.² Untuk itu, sektor pendidikan sebagai upaya membentuk sumber daya manusia yang cakap sangat diperlukan dan harus menjadi perhatian serius suatu bangsa, selain sektor penyangga yang lain.

Dalam memajukan pendidikan di suatu bangsa memang diperlukan juga anggaran yang tidak sedikit, mengingat pendidikan sifatnya berjenjang mulai dasar sampai tingkat tinggi. Bangsa yang mengalokasikan anggarannya ke sektor pendidikan secara besar, maka akan mempengaruhi laju pertumbuhan pendidikan tersebut.³ Sebaliknya, jika bangsa atau negara mengalokasikan anggaran dengan skala kecil atau rendah, maka tidak bisa diharapkan pendidikan tersebut melaju dengan pesat apalagi merata. Hal tersebut tergantung pada kebijakan dan kepekaan pemerintah, apakah pendidikan menjadi skala prioritas atau hanya sebagai sektor pelengkap.⁴

Disaat pendidikan diabaikan dan pemerintah lebih condong kepada pembangunan infrastruktur saja, ibarat seseorang membangun rumah tanpa membina penghuni rumah. Akibatnya, penghuni rumah tidak bisa menggunakan rumah tersebut sebagaimana mestinya, bisa-bisa rumah yang dibangun akan hancur atau tidak berfungsi secara maksimal. Penting tidaknya pendidikan di suatu negara tergantung kecakapan pemimpinnya, jika ia paham secara betul akan pentingnya pendidikan maka ia akan menjadikan pendidikan sebagai sektor utama; prioritas. Sebaliknya, bagi pemimpin suatu bangsa yang menganggap pendidikan sebagai sektor pelengkap, maka dapat dipastikan kejayaan bangsa yang ia pimpin dalam jangka panjang tidak akan bertahan lama.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan sebagai tahapan dalam mendidik manusia menjadi manusia seutuhnya, yang mengerti dan memahami peran dan fungsinya. Bukan menjadi manusia yang “liar” yang keluar dari kodratnya dan melalaikan peran-fungsinya sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa. Manusia yang terdidik, akan membentuk pribadi yang mulia sehingga akan benar-benar menjaga bumi dari kerusakan, peperangan dan perpecahan.⁵ Pribadi yang terdidik inilah yang akan mengantarkan mereka menjadi generasi emas, generasi yang menyatukan bukan pemecah, generasi yang mengutamakan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi dan generasi yang berniat mengabdikan memajukan negeri bukan berniat menghancurkan negerinya.⁶

Pribadi yang saleh (baik) inilah output dari dunia pendidikan, tentu secara fakta masih banyak ditemukan orang terdidik tapi perilakunya menyimpang dan tidak mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Namun, bukan berarti salah pendidikannya atau lembaga pendidikannya secara total, bisa saja faktor lingkungan, pergaulan atau keluarga. Kita harus bijak dalam bersikap terhadap problem tersebut. Seringkali

¹ Mantiri, Jeane. "Peran Pendidikan dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 3.1 (2019): 20-26. Sudarsana, I. Ketut. "Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upaya pembangunan sumber daya manusia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 1.1 (2016): 1-14.

² Hidayati, Nurul. "Konsep Integrasi tripusat pendidikan terhadap Kemajuan masyarakat." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11.1 (2016).

³ Suryana, S. "Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan." *Edukasi* 14.1 (2020).

⁴ Ali, Mohammad. Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo, 2009.

⁵ Hussin, Zaharah. "Mendidik generasi berakhlak mulia: Fokus peranan guru Pendidikan Islam." *Jurnal Masalah Pendidikan* 28.1 (2005): 79-94.

⁶ Susanti, Rani. "Teknologi Pendidikan Dan Peranannya Dalam Transformasi Pendidikan." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2.2 (2013).

dunia pendidikan menjadi sorotan dan disudutkan gara-gara banyak peserta didik, mahasiswa atau lulusan pendidikan yang sikapnya amoral dan “suka” berkonflik.

Hemat peneliti, bukan salah secara total sistem pendidikannya atau lembaganya, tapi cara menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diajarkan di dunia pendidikan yang belum secara maksimal dilakukan oleh sebagian besar peserta didik; mahasiswa, bisa juga cara guru mentransformasikan materi; ilmu kepada peserta didik; mahasiswa yang kurang maksimal. Hal tersebut adalah teknis dalam pengimplementasian pendidikan-pengajaran. Artinya, yang salah bukan pendidikannya, tapi teknis dari penerapan pendidikan tersebut yang kurang maksimal. Saya kira, paradigma tersebut objektif dan bijak untuk mencari titik temu secara adil.

Dunia pendidikan mustahil mengajarkan anak didiknya; mahasiswa menjadi generasi yang buruk, semua pendidikan di dunia pasti mengarahkan anak didiknya menjadi generasi emas yang membangakan. Masalah-masalah pendidikan pasti dialami oleh semua lembaga pendidikan di seluruh dunia, tergantung kecakapan kita untuk merespon dan mencari solusi atas problem tersebut.

Dunia pendidikan sangat berjasa dalam membangun sumber daya manusia di suatu negara, sehingga sudah sepantasnya negara memperhatikan kondisi dunia pendidikannya. Bukan hanya memperhatikan kondisi pendidikan di saat ada problem atau kasus. Perhatian negara atas pendidikan sangat dibutuhkan dan diharapkan khususnya bagi para pendidik (guru; dosen). Mereka tidak bisa berbuat yang lebih untuk kemajuan pendidikan secara utuh, diperlukan tangan-tangan pemangku kebijakan, sehingga bisa saling bersinergi satu sama lain dalam memajukan dunia pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁷

Kemajuan suatu pendidikan tidak bisa diukur hanya pada jumlah siswanya, tenaga pendidikannya, atau akreditasinya, namun masalah sarana prasarana juga perlu diperhatikan. Sarana prasarana menjadi aspek yang juga penting dalam menunjang proses pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Sehebat apapun kurikulumnya, secerdas apapun gurunya tapi jika tidak didukung oleh fasilitas yang memadai (sarana prasarana) akan sulit mencetak peserta didik yang unggul, mutu pendidikan; pembelajarannya akan terkesan monoton; klasikal sehingga mempengaruhi mutu pendidikan di lembaga tersebut. Peserta didik yang sebenarnya bisa dicetak unggul, akan gagal manakala tidak didukung fasilitas yang memadai apalagi di era sekarang yang serba teknologi.⁸ Sehingga, mereka tidak bisa bersaing secara luas, ujung-ujungnya mereka “minder” dengan lulusan; peserta didik lain yang didukung fasilitas yang memadai. Tidak hanya berdampak pada peserta didik; mahasiswa, pendidik (guru; dosen) juga kena imbasnya dari adanya sarana prasana yang rendah, mereka tidak bisa berkreasi, berinovasi. Mengingat, media pembelajaran sebagai alatnya tidak ada, mungkin ada tapi tidak maksimal.⁹

Membangun fasilitas di suatu lembaga pendidikan (dunia pendidikan) memerlukan anggaran dari negara, kecuali bagi sekolah; madrasah; perguruan tinggi yang dinaungi yayasan atau pesantren besar dan maju sudah tidak memerlukan asupan nutrisi dari negara. Anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah cenderung “menganak emaskan” lembaga pendidikan negeri. Sekolah, madrasah atau perguruan tinggi swasta harus mati-matian mencari “biaya” hidup secara mandiri untuk tetap eksis. Mereka setiap menjelang ajaran baru selalu diliputi rasa gelisah dan khawatir tentang penerimaan mahasiswa; peserta didik baru, akankah banyak yang mendaftar atukah sedikit atukah tidak ada. Hal ini pasti dan pasti dialami oleh sebagian besar lembaga pendidikan swasta, khususnya yang memiliki fasilitas; sarana rendah.¹⁰

⁷ Fadhli, Muhammad. "Manajemen peningkatan mutu pendidikan." *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1.2 (2017): 215-240.

⁸ Yustikia, Ni Wayan Sri. "Pentingnya Sarana Pendidikan Dalam Menunjang Kualitas Pendidikan Di Sekolah." *GUNA WIDYA: JURNAL PENDIDIKAN HINDU* 4.2 (2019): 1-12.

⁹ Wardani, Aswinda, and Hade Afriansyah. "Pentingnya Sarana dan Prasarana Pendidikan." (2019).

¹⁰ Pusvitasari, Rita, and Mukhamad Sukur. "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan*

Secara teori memang tidak ada orang tua yang ingin anaknya sekolah; kuliah di lembaga pendidikan yang kurang maju, atau dengan fasilitas yang tidak mendukung. Mereka akan memilih menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan yang bermutu, bagus, fasilitas lengkap dan banyak prestasi. Sekolah yang kekurangan sarana prasarana tidak mungkin bisa atau sangat sulit untuk bisa berprestasi unggul dari sekolah-sekolah yang memang sudah kuat secara fasilitas dan mutu.

Hal tersebut masih sepiantas sekolah swasta, ada yang lebih memperhatikan yakni madrasah swasta yang dikelola oleh yayasan sederhana yang hanya bisa bertahan lewat “pundi-pundi” pembayaran peserta didik dan mungkin sebagian dari Dana Bos. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang sangat “mencolok” ketertinggalannya dengan sekolah umum. Pendapat tersebut wajar adanya, mengingat anggaran pendidikan dari pemerintah dipecah menjadi dua kementerian, yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan serta perguruan tinggi yang menanugi lembaga pendidikan umum, dan kementerian agama yang menaungi lembaga pendidikan Islam, haji, wakaf, zakat, infaq, pengadilan agama dan KUA. Bisa dibayangkan kementerian agama dengan anggaran yang jauh lebih kecil dibanding anggaran yang didapat kementerian pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan tinggi, masih dibagi-bagi dengan beberapa sektor. Ini sungguh tidak masuk akal, di luar logika mana bisa lembaga pendidikan Islam maju melebihi pendidikan umum, dari segi anggaran saja jauh beda. Sehingga, bisa kita saksikan bagaimana nasib dan wajah madrasah-madrasah yang ada di Indonesia mulai tingkat rendah sampai atas. Belum kampus yang berhaluan agama (kampus Islam) yang swasta akan nampak jauh kesenjangan dengan kampus-kampus umum, meskipun itu swasta.

Untuk mengejar ketertinggalan inilah diperlukan adanya program pemerataan pembangunan pendidikan secara Nasional, khususnya dalam segi anggaran. Karena membangun fasilitas (sarana prasana) pendidikan dibutuhkan biaya agar lembaga pendidikan tersebut bisa bermutu dan berkualitas dalam semua aspek. Fasilitas yang memadai akan memudahkan guru dalam berkreasi dan berinovasi, peserta didik; mahasiswa juga akan lebih cepat berkembang, cakap dalam melakukan inovasi dan penemuan-penemuan lainnya yang bermanfaat.¹¹

Dalam membangun pemerataan pembangunan pendidikan Nasional di Indonesia hemat saya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

Pertama, anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan serta pendidikan tinggi, memang sudah banyak namun jika dimungkinkan ditingkatkan lagi untuk mengejar ketertinggalan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang masih jauh dari kemajuan. Sekolah-sekolah negeri yang sudah baik, maju dalam segi kualitas dan kuantitas seharusnya tidak disamakan dengan sekolah-sekolah swasta yang masih rendah mutu pendidikannya dalam segi anggaran. Yang saya amati, sekolah-sekolah negeri semakin tahun semakin maju, dan pasti membangun atau merenovasi. Sedangkan sekolah-sekolah umum, tahun ke tahun tetap sampai atap runtuh. Baru dikasih bantuan. Harusnya, sekolah negeri yang sudah maju dan berkembang, anggarannya diperkecil mengingat kebutuhan mereka sudah banyak terpenuhi, hanya tinggal meningkatkan dan memelihara segala fasilitas yang sudah ada. Kemudian, anggaran untuk sekolah-sekolah swasta diperbesar untuk mendulang pembangunan agar merata. Bayangkan banyak sekolah swasta, khususnya di pedalaman yang sangat tidak layak, mulai dari atap, tembok, kondisi kelas, media pembelajaran di dalam kelas dan kesejahteraan guru. Jika sekolah-sekolah swasta diangkat dan dibenahi secara Nasional, maka dapat dipastikan akan terjadi pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Sekolah swasta yang sudah di”sulap” megah, mewah dan baik dengan

Islam 4.1 (2020): 94-106. Baca juga Haji, Edi, Burhanuddin Kiyai, and Jericho Pombengi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi Di Sekolah Menengah Atas (Sma/Ma) Kota Tidore Kepulauan)." *Jurnal Administrasi Publik* 4.32 (2015).

¹¹ Nurjanah, Siti. "Human Capital Dan Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Econosains* 12.1 (2014): 83-90.

fasilitas yang memadai akan dilirik oleh orang tua calon peserta didik dan khalayak umum, sehingga setiap pergantian tahun mereka tidak khawatir akan jatah anak didik yang mendaftar ke sekolahnya tersebut. Dan sekolah swasta akan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri, dan akan lebih berani menunjukkan “taringnya” untuk berkompetisi.

Kedua, anggaran kementerian agama yang salah satunya menaungi lembaga pendidikan Islam; madrasah sangat minim. Hemat saya, anggaran kementerian agama harus diperbesar lagi, mengingat kementerian agama menaungi banyak bidang tidak hanya pendidikan agama saja, lain halnya dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang fokus mengurus pendidikan di Indonesia. Agar jatah anggaran untuk pendidikan Islam juga kian banyak. Atau membuat kementerian baru yang hanya fokus mengurus dunia pendidikan Islam. Kefokusan ini diharapkan mampu memusatkan segala perhatiannya untuk perbaikan, pengelolaan dan kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Selama pendidikan Islam di kelola oleh kementerian agama yang itu juga mengurus masalah lain, maka pendidikan Islam di Indonesia tidak akan bisa menjadi prioritas bagi program kementerian agama. Untuk itu, pemerintah harus mengkaji lebih serius lagi peran kementerian agama apakah secara anggaran dan birokrasi mampu mengurus lembaga pendidikan Islam di Indonesia mulai dari tingkatan rendah sampai Perguruan Tinggi secara baik dan menyeluruh. Semua itu memang memerlukan sebuah kajian dana analisis, apakah sudah cukup dengan menambah anggaran untuk kementerian agama bisa menjadikan alat ukur untuk memajukan pendidikan Islam secara menyeluruh, ataukah perlu dibentuknya kementerian baru yang hanya fokus mengurus dunia pendidikan Islam di Indonesia. Dua opsi ini kiranya perlu diperhatikan oleh pemerintah secara serius agar tidak ada lagi ketimpangan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum dan juga antara sekolah swasta dengan sekolah negeri.

Dengan demikian, yang penulis kritisi di sini adalah kesenjangan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta dan antara sekolah umum dengan madrasah. Dengan solusi yang sudah penulis tawarkan di atas. Mudah-mudahan solusi tersebut dapat menjadi jalan alternatif bagi terwujudnya pemerataan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Paling tidak, solusi di atas dapat dijadikan pertimbangan oleh pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah-pejabat terkait.

Sudah waktunya dunia pendidikan di Indonesia berbenah, bukan hanya berbenah setiap lima tahun sekali dengan bergantinya kurikulum dan peraturan-peraturan yang bersifat administratif. Mengapa tidak ada program pembenahan sarana prasarana untuk lembaga- lembaga pendidikan yang secara nyata-nyata memerlukan sarana; fasilitas yang memadai. Sekolah negeri semakin hari semakin menjulang, sedangkan sekolah swasta semakin hari tidak menunjukkan peningkatan secara fasilitas secara drastis, apalagi madrasah-madrasah swasta yang kian hari “tercekik” akibat jumlah murid yang kian tahun menipis. Bagi sekolah/madrasah yang maju sebelumnya karena didukung oleh dana yayasan yang besar sehingga bisa memenuhi berbagai keperluannya secara mandiri, namun ini hanya berapa persen jika ditotal sekolah/madrasah swasta yang ada di Indonesia? Sehingga tidak bisa dijadikan patokan kalau sekolah/madrasah swasta di Indonesia sudah maju dan merata. Secara fakta memang tidak demikian, masih banyak dan sangat banyak sekolah/madrasah swasta di daerah-daerah terpencil bahkan di kota besar yang masih memiliki sarana prasarana yang terbatas.

Keterbatasan dari segi sarana inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa bersaing secara “cepat” dengan sekolah-sekolah negeri yang sudah maju terlebih dahulu dengan asupan anggaran yang begitu besar dan lancar. Status negeri bukan berarti menjadi “anak emas”, sedangkan status “swasta” menjadi anak tiri suatu bangsa. Mengingat, peran dan tujuan antara sekolah negeri maupun swasta atau sekolah umum maupun madrasah adalah sama, yakni sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa, melahirkan peradaban dan mengembangkan aspek-aspek pendidikan lainnya. Sehingga, tidak tepat jika sekolah negeri milik pemerintah sehingga harus maju, sedangkan sekolah swasta milik non pemerintah sehingga harus hidup secara mandiri. Bagitupun dengan madrasah. Ini sebuah paradigma yang sesat dan fatal.

Pemerintah bisa menerapkan satu harga BBM untuk seluruh wilayah Indonesia, sudah berhasil melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, dan pemerintah juga memberikan

anggaran besar untuk desa (dana desa) agar tidak tertinggal dengan kota, di samping untuk memutus proses urbanisasi masyarakat. Namun, apakah pemerintah tidak bisa untuk melakukan pemerataan pembangunan pendidikan nasional di Indonesia? Jika mampu, lantas kapan? Sampai saat ini tidak ada program yang mengarah kesana. Dengan semakin majunya pendidikan di negara-negara luar sana, apakah tidak bisa menjadikan “magnet” pemerintah untuk serius memajukan pendidikan dalam negeri, melalui pengembangan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan kita, bukan selalu sibuk dengan urusan administrasi, sosialisasi, workshop, dan seminar-seminar nasional lainnya yang hal itu tidak ada feed back bagi perbaikan sistem pendidikan maupun bagi pendidik itu sendiri, semua itu berjalan hanya formalitas semata. Kegiatan-kegiatan tersebut sejauh ini belum bisa membuka paradigma baru bagi pendidik dan lembaga pendidikan secara signifikan. Semisal, sosialisasi untuk menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang variatif dan menarik berbasis android/ media online saat pembelajaran, ini akan sulit diterapkan di sekolah/madrasah yang belum mempunyai LCD, atau koneksi internet dan lain sebagainya. Meskipun, rata-rata sekolah/madrasah sudah mempunyai LCD meskipun hanya satu dan wifi internet, tapi belum bisa dijadikan jawaban; kesimpulan bahwa semua sekolah/madrasah di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet dan sudah memiliki LCD.¹² Artinya bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh mapan tidaknya sarana prasarana yang dimiliki oleh masing-masing lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Anggaran untuk merubah kurikulum nasional, anggaran untuk mensosialisasikan, workshop dan diklat lainnya itu juga tidak sedikit. Kita tahu bahwa mensosialisasikan kurikulum 2019 secara nasional tidak mudah dan itu memerlukan waktu yang tidak lama. Seharusnya, pemerintah sebelum melakukan pembaharuan dan perubahan kurikulum secara nasional, terlebih dahulu melihat kondisi lembaga pendidikan secara nasional, apakah sudah siap atautkah masih belum? Sepanjang yang saya tau, masih banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang belum siap dengan pemberlakuan kurikulum 2013, sehingga kurikulum ini diterapkan secara bertahap. Tentu, bagi saya ini sebuah langkah yang tidak efektif dan terkesan terburu-buru. Permasalahan pendidikan mendasar bukan pada sistem kurikulumnya, tapi pada pemerataan pembangunan yang hal ini meliputi fasilitas dan sarana prasarana pendidikan secara nasional.

Kesenjangan antara sekolah satu dengan sekolah lain ini masih ada dan kelihatan secara nyata. Seharusnya ini dulu yang diselesaikan dan diperhatikan secara serius. Peneliti menyakini mau dirubah sebagus apapun kurikulumnya atau hal-hal yang bersifat administratif lainnya tidak akan bisa memajukan pendidikan di Indonesia secara nasional. Mungkin bagi lembaga pendidikan yang sudah maju, fasilitas mumpuni pasti akan bisa menyesuaikan. Tapi bagi lembaga pendidikan yang kurang akan fasilitas, akses dan lainnya akan menjadikan beban dan kian mempersulit. Namun, jika yang diprogramkan adalah pemerataan pembangunan pendidikan secara nasional dan sudah benar-benar direalisasikan kemudian mau diterapkan kurikulum baru, saya menyakini semua lembaga pendidikan di Indonesia akan siap dan mau maju secara bersama-sama.

Kemudian, masalah kebijakan menteri Nadiem Makarim sebagai menteri pendidikan Indonesia tentang “Merdeka Belajar” sepanjang saya pahami ini sebagai kebijakan bagus dan efektif, namun lagi-lagi ini masalah administratif dan kebijakan yang bersifat internal. Memang seorang menteri tidak bisa membuat kebijakan tentang “pemerataan pembangunan pendidikan nasional”, mengingat ini masalah anggaran yang itu masuk wilayah kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI. Namun, seyogyanya melalui menteri pendidikan yang paham betul masalah dunia pendidikan di Indonesia, ia menyampaikan usulan terkait program tersebut kepada pemerintah dalam hal ini presiden, agar dipertimbangkan untuk selanjutnya dibahas bersama dengan anggota dewan.

Problem pokok pendidikan di Indonesia bukan pada pendidiknya, peserta didiknya, atau kurikulumnya tapi kepada sarana prasarananya yang kurang mumpuni. Pendidik dan peserta didik di sekolah maju akan semakin canggih dan kreatif, karena didorong oleh fasilitas yang mumpuni, sebaliknya pendidik dan peserta didik yang ada di sekolah kurang maju bahkan tertinggal akan “hidup” seadanya, melakukan pembelajaran

¹² Astawa, I. Nyoman Temon. "Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3.2 (2017): 197-205.

seperti biasa dan pada intinya “pokoknya belajar”, sehingga wajar tidak ada niatan untuk berinovasi dan berkreasi, karena media yang dijadikan untuk melakukan inovasi dan kreasi tidak ada, mungkin ada tapi terbatas. Sedangkan, dana sekolah tidak bisa menunjang hal tersebut. Jadi, sekolah yang maju akan tambah maju, dan sekolah yang tertinggal akan semakin tertinggal manakala tidak ada uluran bantuan dari pemerintah pusat melalui program pemerataan pembangunan pendidikan nasional.

Secara logika sekolah atau madrasah yang kurang maju tidak akan bisa mengejar atau bersaing dengan sekolah-sekolah maju secara signifikan kalau mereka tidak dikasih alat; bahan yang dalam hal ini adalah fasilitas. Mengingat, menjadi maju, tidak hanya perlu kecerdasan pendidik, kecakapan peserta didik tapi juga sarana yang mumpuni untuk mendulang itu semua.

Peneliti yakin jika pemerataan pembangunan pendidikan nasional ini benar-benar digalakkan maka tidak ada namanya sekolah maju dan sekolah tidak maju, sekolah favorit dan non favorit, sekolah mewah dan non mewah dan “lebel” lainnya. Semua akan sama rata, dan orang tua juga tidak akan memilah-milah sekolah mana yang maju dan tidak maju untuk anaknya. Sehingga, selain merata dalam bidang pembangunan, juga akan merata dalam penerimaan masing-masing siswa baru. Ini akan menghilangkan “keresahan” di setiap menjelang tahun ajaran baru bagi sebagian sekolah-sekolah yang membutuhkan peserta didik baru yang dalam hal ini banyak dialami oleh sekolah-sekolah; madrasah swasta.

Pemerataan pembangunan pendidikan nasional ini juga akan mendulang madrasah sebagai basis pendidikan Islam di Indonesia, agar tidak selalu dipinggirkan oleh sebagian masyarakat. Kemajuan fasilitas dan kelengkapan sarana prasana akan mendesain madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang “mewah” yang nantinya dapat memikat hati masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Selain itu, madrasah akan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain dalam segala hal, baik itu bidang akademik maupun non akademik. Sehingga, tidak ada kesan bahwa madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang terpinggirkan.

Adanya pemerataan pembangunan pendidikan nasional sebagai bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi dunia pendidikan di Indonesia yang nantinya akan berdampak pada kemakmuran pendidik (guru) dan lingkungan yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Hal ini juga akan memudahkan pemerintah untuk melakukan suatu kebijakan, baik berkenaan dengan perubahan kurikulum, pembelajaran daring atau penilaian dan kebijakan pendidikan nasional lainnya. Jadi, tidak ada alasan yang mendasar adanya sekolah yang tidak siap dengan kebijakan tersebut, mengingat semua sekolah; madrasah memiliki standar sarana; fasilitas yang sama; merata. Tinggal kecakapan dari kepala sekolah dan guru dibantu dengan tenaga lain untuk mengembangkan sarana prasana tersebut menjadi baik dan bisa digunakan untuk memajukan pembelajaran, ekstrakurikuler dan layanan pendidikan lainnya. Tentu ini memerlukan evaluasi setiap tahunnya oleh pemerintah pusat atau pejabat kementerian pendidikan terkait pendayagunaan fasilitas; sarana prasarana tersebut.

Untuk itu, kiranya pemerintah harus bergerak cepat untuk mengentaskan permasalahan mendasar pendidikan yang ada di Indonesia ini, salah satunya melalui pemerataan pembangunan pendidikan nasional. Harus fokus disini terlebih dahulu baru fokus kemasalah pendidikan yang lain. Pemerataan pembangunan pendidikan ini sebagai usaha untuk menghilangkan kesenjangan antar lembaga pendidikan di Indonesia dan juga untuk mengejar ketertinggalan sebagian besar lembaga pendidikan Indonesia serta untuk menghilangkan status “anak kandung” (sekolah negeri) dan “anak tiri” (sekolah swasta).

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerataan pembangunan pendidikan nasional ini juga sebagai representasi dari sila kelima yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adanya program ini sebagai bentuk keadilan sosial. Pendidikan bukan milik orang kota, tetapi juga semua masyarakat Indonesia. Fasilitas pendidikan bukan hanya dimiliki oleh siswa kota-kota besar, tapi juga siswa-siswa seluruh Indonesia. Kemudian, yang mewakili

Indonesia berkompetisi secara Internasional bukan hanya diwakili oleh siswa-siswa dari sekolah yang maju, tapi siswa- siswa di desa dan di sekolah kurang maju juga punya hak yang sama untuk mewakili bangsanya secara Internasional. Ini akan benar-benar terwujud manakala pemerataan pembangunan pendidikan nasional benar-benar digalakkan dan menjadi skala prioritas pemerintah dalam bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mantiri, Jeane. "Peran Pendidikan dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 3.1 (2019): 20-26.
- [2] Sudarsana, I. Ketut. "Peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dalam upayapembangunan sumber daya manusia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 1.1 (2016): 1-14.
- [3] Hidayati, Nurul. "Konsep Integrasi tripusat pendidikan terhadap Kemajuan masyarakat." *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11.1 (2016).
- [4] Suryana, S. "Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan." *Edukasi* 14.1 (2020).
- [5] Ali, Mohammad. *Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi*. Grasindo, 2009.
- [6] Hussin, Zaharah. "Mendidik generasi berakhlak mulia: Fokus peranan guru Pendidikan Islam." *Jurnal Masalah Pendidikan* 28.1 (2005): 79-94.
- [7] Susanti, Rani. "Teknologi Pendidikan Dan Peranannya Dalam Transformasi Pendidikan." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 2.2 (2013).
- [8] Fadhli, Muhammad. "Manajemen peningkatan mutu pendidikan." *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan* 1.2 (2017): 215-240.
- [9] Yustikia, Ni Wayan Sri. "Pentingnya Sarana Pendidikan Dalam Menunjang Kualitas Pendidikan Di Sekolah." *GUNA WIDYA: JURNAL PENDIDIKAN HINDU* 4.2 (2019): 1-12.
- [10] Wardani, Aswinda, and Hade Afriansyah. "Pentingnya Sarana dan Prasarana Pendidikan." (2019).
- [11] Pusvitasari, Rita, and Mukhamad Sukur. "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)." *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2020): 94-106.
- [12] Haji, Edi, Burhanuddin Kiyai, and Jericho Pombengi. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Suatu Studi Di Sekolah Menengah Atas (Sma/Ma) Kota Tidore Kepulauan)." *Jurnal Administrasi Publik* 4.32 (2015).
- [13] Nurjanah, Siti. "Human Capital Dan Peranan Pemerintah Dalam Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Econosains* 12.1 (2014): 83-90.
- [14] Astawa, I. Nyoman Temon. "Memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam kemajuan mutu pendidikan di Indonesia." *Jurnal Penjaminan Mutu* 3.2 (2017): 197-205.